

**AGAMA DAN KEKERASAN
TINJAUAN TERHADAP KONFLIK BERAGAMA
DI MALUKU**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk memenuhi syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu Agama
dalam Ilmu Ushuluddin**

Oleh :

HAIRUL SANI
NIM : 9552 1870

**JURUSAN PERBANDINGAN AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Secara historis sebenarnya masyarakat Maluku khususnya masyarakat Ambon dapat menerima dan menghargai pluralitas agama, bahasa maupun etnis. Bagi masyarakat Maluku baik masjid maupun gereja adalah milik mereka bersama. Mereka bergotong royong dalam membangun dan memeliharanya. Mungkin hal ini berakar pada nilai tradisional gandong, yang arti harfiahnya adalah rahim (womb) yang melahirkan mereka bersama, meskipun berbeda agama. Loyalitas dan solidaritas antara anggota masyarakat amat mendalam. Mereka etnis yang pemaaf dan bukan pendendam. Meskipun konflik antara kelompok social sering terjadi tetapi selalu dapat di selesaikan melalui consensus cultural yang merefleksikan dialektika yang harmonis secara pola manajemen cultural. Namun kekerasan yang berbentuk di Ambon-Maluku itu sudah menjadi suatu kenyataan, dan peristiwa tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa masalah kerusuhan Maluku merupakan implikasi dari berbagai kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi kekuasaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-historis, dan dalam mengumpulkan data dengan melakukan kajian pada bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan, yang mana bahan-bahan kepustakaan ini merupakan sumber data primer yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa: yang menjadi factor penyebab kerusuhan Ambon-Maluku 19 Januari 1999 sampai sekarang antara lain adalah factor sejarah, factor perubahan komposisi penduduk dan kesenjangan social-ekonomi, factor politisasi birokrasi local (Islamisasi dan Kristenisasi birokrasi), factor hancurnya mekanisme tradisional (Pela Gandong), dan factor reformasi. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama kerusuhan Ambon-Maluku adalah kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung.

Drs. Chumaidi Syarif Romas
Drs. Rahmat Fajri
Dosen Fakultas Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Hairul Sani
Lampiran : 6 (enam) Eksemplar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas
Ushuluddin
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.WB.

Setelah membaca, meneliti, mengadakan bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **Hairul Sani** yang berjudul, "**Agama dan Kekerasan Tinjauan Terhadap Konflik Beragama di Maluku**", telah dapat diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian dari kami, semoga dalam waktu dekat skripsi tersebut dapat di pertanggungjawabkan di depan sidang munaqasah, dan bersama ini kami lampirkan 6 (enam) eksemplar skripsi di maksud.

Sebelum dan sesudahnya, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.WB.

Yogyakarta, 31 Juli

2001

Hormat Kami

Pembimbing II

Drs. Rahmat Fajri

NIP: 150 275 041

Pembimbing I

Drs. Chumaidi Syarif Romas

NIP: 150 198 449



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALLJAGA

FAKULTAS USHULUDDIN

Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512156 Yogyakarta)

PENGESAHAN

Nomor: IN/I/DU/PP.00.9/255/2001

Skripsi dengan judul : Agama dan Kekerasan Tinjauan Terhadap Konflik Beragama di Maluku

Diajukan oleh :

1. Nama : Hairul Sani
2. NIM : 9552 1870
3. Program Sarjana Strata 1 Jurusan : PA

Telah dimunaqosyahkan pada hari : Jum'at, tanggal : 24 Agustus 2001 dengan nilai : B dan telah dinyatakan syah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Agama 1 dalam ilmu : Ushuluddin

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang

~~Drs. H. Subagyo, M.Ag
NIP. 150234514~~

Sekretaris Sidang

~~Drs. Indal Abror, M.Ag
NIP. 150259420~~

~~Pembimbing/merangkap penguji~~

~~Drs. H. Chumaidi Syarif Romas
NIP. 150198449~~

Pembantu Pembimbing

~~Drs. Rahmat Fajri
NIP. 150275041~~

Penguji I

~~Dr. H. Agus Salim Sitompul
NIP. 150169820~~

Penguji II

~~M. Soehadha, S.Sos
NIP. 150291739~~

Yogyakarta, 24 Agustus 2001

DEKAN

~~Dr. Djam'annuri, MA
NIP. 150182860~~

MOTTO

***“Hai orang-orang yang beriman,
apabila kamu bertemu dengan
orang-orang yang kafir yang sedang
menyerangmu, maka janganlah
kamu membelakangi mereka
(mundur)”***.¹

(Q.S. al-Anfal: 15)

¹R.H.A. Soenarjo dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 262.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- **Almamater**
- **Orang tua tercinta Rasani Usman dan Kamalah**
- **Adik-adikku yang ku sayangi**
(Fitriani, Heriadi, Jamiat dan Darmawan)

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini dengan lancar. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi Muhammad s.a.w., kerabat, dan segenap sahabatnya, juga para pengikutnya yang telah berjuang di jalan Allah, untuk tegaknya agama Islam.

Adapun maksud dari penulisan skripsi ini selain untuk memnuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu agama dalam ilmu-ilmu Ushuluddin, juga sebagai sumbangsih penulis bagi pengembangan ilmu pengetahuan di almamaterku tercinta ini, khususnya fakultas Ushuluddin Ilmu Perbandingan Agama.

Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf-stafnya yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Chumaidi Syarif Romas dan Bapak Drs. Rahmat Fajri yang telah memotivasi dan membimbing penyusunan skripsi ini.
3. Bapak dan ibu serta adik-adikku yang telah memberiku perhatian dan kepercayaan yang besar sehingga saya mampu menyelesaikan studi ini.
4. Seluruh keluarga yang telah mendukung kelanjutan studi ku di Perguruan Tinggi hingga selesai

5. Staf perpustakaan UPT IAIN Sunan Kalijaga dan perpustakaan Kolese Ignatius yang telah membantu kelancaran dalam memperoleh referensi.
6. Teman-teman di kelompok kajian BELAMPAR (Beni Rumputan, Indra Ai', Deni Dasi, dan Pradono).
7. Teman-temanku yang juga telah ikut membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain: Sahrul Muttaqien (OOL), Sapihan (Mr. Jungko), Timur Triono (Ado), Tri Nugroho (Ndut), Angank (si Jo), Hendra (Bangjeng), Indra Mayordin, Ian Sanggol, Aef Satriadi, Sri Dewi (Ocong), Aswin, Anjang Tursina, Hilyati, Ambarwati, Iit, Jingga, Adi, Heru, teman-teman di Perbandingan Agama dan teman-temanku lainnya yang tidak bisa disebut namanya.
8. Teman-teman di KPMKB dan khususnya di Asrama Rahadi Osman 1 dan Asrama Dara Juanti Yogyakarta.
9. Serta semua pihak yang telah membantu baik secara teknis maupun moril sampai terselesaikannya skripsi ini

Dengan iringan do'a dan harapan semoga skripsi ini bermanfaat, penulis juga mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari pembaca semua demi kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 15 Agustus 2001

Penulis

Hairul Sani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Metode Penelitian	12
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Sistematika Pembahasan	16
 BAB. II. SITUASI UMUM AMBON SEBELUM KERUSUHAN DAN	
TIGA FASE KONFLIK	17
A. Struktur Warisan Masa Lalu.....	18
1. Sebelum Kolonial	18
2. Masa Kolonial	21
B. Perkembangan Hubungan Agama di Masa Orde Baru	25

1. Perkembangan dan Komposisi Penduduk	26
2. Perkembangan Sosial-Ekonomi	28
3. Perubahan Sosial-Politik	31
4. Modernisasi Budaya	36
C. Tiga Fase Konflik	43
1. Konflik Fase Pertama	44
2. Konflik Fase Kedua	46
3. Konflik Fase Ketiga	48

BAB III. PERBEDAAN PERSEPSI DAN FAKTOR-FAKTOR

PENYEBAB KERUSUHAN	50
A. Perbedaan Persepsi	50
1. Dimensi Konflik Internal	54
2. Persepsi Konflik Eksternal	61
2.1. Tentang Keterlibatan TNI/POLRI	63
2.2. Tentang Gerakan Separasi	69
3. Interpretasi Lain	71
B. Faktor-faktor Penyebab Kerusuhan	83
1. Faktor Sejarah	83
2. Faktor Perubahan Komposisi Penduduk dan Kesenjangan Sosial-Ekonomi	84
3. Faktor Politisasi Birokrasi Lokal (“Islamisasi” dan “Kristenisasi” Birokrasi)	89
4. Faktor Hancurnya Mekanisme Tradisional	90
5. Faktor Reformasi	92

BAB IV. BENTUK-BENTUK KEKERASAN DAN AKIBAT YANG DITIMBULKANNYA	99
A. Korban Kekerasan Langsung	100
1. Korban Nyawa dan Luka	101
2. Korban Pengungsi	102
B. Kekerasan Tidak Langsung	105
1. Kerusakan Fisik	105
2. Pranata dan Kegiatan Sosial-Ekonomi Lumpuh	107
3. Segregasi Sosial	113
4. Kondisi Pasca Penghujung Perang Sipil	115
 BAB V. PENUTUP	 118
A. Kesimpulan	118
B. Saran	120
C. Kata Penutup	120

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Penduduk Maluku Berdasar Pengelompokan Agama (dalam %)..	85
Tabel 3.2. Penduduk Kepulauan Maluku Berdasarkan Wilayah dan Pengelompokan Agama Tahun 1993 (dalam %)	86
Tabel 5.1. Senjata Sitaan dari Ambon	96

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia, di mana kita hidup dan berkembang, adalah negara yang sangat majemuk atau beraneka-ragam. Kemajemukan ini terdiri dari berbagai macam segi, yaitu : keanekaan agama, keanekaan suku bangsa, keanekaan golongan dan bahkan di dalam tiap kelompok itu masing-masing masih ada berbagai keanekaan internal yang secara vertikal membeda-bedakan anggota kelompok itu, misalnya perbedaan pelapisan secara ekonomis, perbedaan tingkat pendidikan dan seterusnya.

Keanekaragaman itu merupakan suatu anugerah dan memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia, tetapi sekaligus mengandung potensi konflik bahkan perpecahan. Pemahaman yang salah terhadap keanekaragaman itu akan dapat menimbulkan konflik dan perpecahan.¹ Konflik dan perpecahan itu akan semakin fatal jika sumber konflik dan perpecahan itu adalah agama. Hal itu bukan hanya karena orang sangat sensitif terhadap persoalan agama, sehingga hal yang kecil bisa dipersoalkan, tetapi lebih dari itu persoalan agama itu mampu melewati batas-batas suku, bangsa bahkan negara. Hal inilah yang mewarnai keprihatinan-keprihatinan yang terjadi di bumi Indonesia akhir-akhir ini, di mana agama tidak lagi menjadi

¹Budyanto, "Dasar Teologis Kekerasan dalam Masyarakat yang Beraneka-ragam", (Dalam: *Gema* edisi 56 UKDW, 2000), hlm. 67.

sumber kerukunan dan cinta kasih, tetapi menjadi sumber pertikaian dan disintegrasi bangsa.

Agama memiliki dua sisi yang kontradiktif. Di satu sisi, ia mengajari umat manusia untuk saling mengasihi. Agama telah banyak berjasa menjadikan manusia mengerti arti dan tujuan hidupnya. Namun, di sisi lain, ia juga digunakan sebagai alat untuk “membasmi komunitas manusia lain”. Dalam sejarahnya, nasib agama demikian mengesankan. Ia diperlakukan sebagai legitimasi politik bagi penguasa-penguasa korup. Nilai-nilai suci agama menjadi lebur seiring dengan semakin tumpah ruahnya perilaku destruktif manusia yang menggunakannya sebagai kotak pendapat.

Banyak kasus kerusuhan yang menimpa Indonesia, terutama di Ambon-Maluku, lebih bernuansa atau melibatkan simbol-simbol keagamaan. Dengan nama agama manusia rela saling menghancurkan dan cenderung menjadikan agama sebagai pembenar bagi tindakan-tindakan atau perilaku yang destruktif. Dalam hal ini, nilai sakral agama menjadi hilang. Agama hanya digunakan untuk melakukan mobilisasi-mobilisasi dari kekuatan tertentu, sebagai upaya untuk mendominasi atau menguasai potensi-potensi obyektif yang ada dalam kehidupan masyarakat. Persoalannya adalah bahwa proses itu ternyata memuat potensi yang bisa mengganggu keselarasan hubungan antar umat beragama. Dalam masyarakat seperti itu, militansi cenderung meningkat, fundamentalisme berkembang, toleransi antar pemeluk agama menurun.

Salah satu dugaan adalah bahwa keberhasilan modernisasi sosial-ekonomi telah mendorong kepercayaan diri semakin besar. Bagi kelompok pemeluk agama

yang semula sebagian besar berada di lapisan bawah, mobilitas vertikal itu nampaknya juga menimbulkan penegasan identitas kelompok. Akibatnya, karakteristik hubungan “kita-mereka” menjadi transparan. Berbagai simbol dan atribut yang menunjukkan perbedaan semakin tinggi. Apabila kesadaran ini diikuti dengan perbedaan kondisi obyektif, seperti kelas sosial, maka kesadaran konflik akan mudah berkembang.²

Dugaan lain adalah terjadinya kemerosotan otoritas lembaga agama di berbagai kalangan umat beragama.³ Kita akan melihat suatu kondisi yang sangat dilematis, ketika organisasi-organisasi keagamaan berusaha mempengaruhi masyarakatnya. Yang pertama berhubungan dengan masalah mempertahankan disiplin kelompok, asumsinya adalah bahwa disiplin etik dan keagamaan yang ketat pasti akan bertentangan dengan tingkah laku sebagian anggota kelompok. Kemampuan dan perhatian setiap individu di bidang keagamaan tidaklah sama, sebagian sangat bergairah di bidang keagamaan atau mengabdikan diri secara total kepada tujuan-tujuan keagamaan. Dan sebagian lain mungkin menganggap hal itu tidak terlalu penting. Asumsi kedua berhubungan dengan masalah bagaimana mempengaruhi tingkah laku manusia adalah bahwa biasanya tujuan-tujuan etik dari organisasi-organisasi keagamaan itu tidak sejalan dengan tujuan-tujuan konvensional masyarakat dan lembaga-lembaganya.⁴

²Mohtar Mas'ood, dkk, ed., *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 16

³*Ibid.*, hlm. 17

⁴Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), hlm. 146-147.

Di sisi lain, proses pembangunan nasional itu juga mempengaruhi kondisi religiusitas warga masyarakat. Pengaruh itu bisa datang secara langsung, melalui kebijakan pemerintah yang memang dirancang untuk menggalakkan kehidupan beragama (misalnya, melalui pendidikan), maupun tidak langsung (misalnya, peningkatan kemakmuran mendorong munculnya fasilitas peribadatan yang lebih baik). Baik langsung maupun tidak langsung proses pembangunan itu telah menciptakan kondisi yang mendorong peningkatan religiusitas masyarakat.⁵

Untuk memahami karakteristik dan ragam tindakan di Indonesia, khususnya di Maluku, diperlukan suatu kerangka konseptual yang bisa membantu menggambarkan karakteristik dan dinamika kekerasan kolektif dan menjelaskan hubungan antara berbagai tindakan kekerasan itu dengan berbagai variabel yang berkaitan.

Dalam literatur ilmu sosial ditemukan dua pengertian dari kekerasan. Ted Robert Gurr, yang memusatkan perhatian pada *political violence*, mendefinisikan kekerasan sebagai:

*“all collective attacks within a political community against the political regime, its actors –including competing political groups as well as incumbents- or its politicians. The concept represents a set of events, a common property of which is the actual or threatened use of violence the concept subsumes revolution, guerilla war, coups d’etat, and riots”.*⁶

“semua kekerasan kolektif meliputi masyarakat politik melawan kekuasaan politik, itu adalah pelaku-pelakunya –termasuk di dalamnya kelompok oposisi yang setingkat dengan pemegang jabatan- atau penentu kebijakan. Konsep ini menggambarkan kejadian secara keseluruhan, persamaan sifat

⁵Mohtar Mas’oed, dkk., ed., *op.cit.*, hlm. 19.

⁶Ted Robert Gurr, *Why Men Rebel*, (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970), hlm. 3-4, dikutip dari buku Mohtar Mas’oed, *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 20.

yang sebenarnya atau yang mengancam dengan menggunakan kekerasan termasuk konsep revolusi, perang gerilya, kudeta, dan kerusuhan”.

Konsep kekerasan oleh Gurr ini nampak sangat luas, yang melibatkan seluruh masyarakat politik melawan kekuasaan politik. Namun sebenarnya pengertiannya terbatas, yang hanya mengenai tindakan yang dilakukan oleh aktor atau kelompok aktor yang menentang penguasa negara. Berdasarkan definisi itu, kekerasan politik tidak dilakukan oleh penguasa negara, tetapi oleh mereka yang menentangnya. Padahal, dalam kenyataannya, penguasa juga melakukan banyak tindakan kekerasan terhadap rakyat yang dikuasainya. Pengertian yang lebih luas diajukan oleh Johan Galtung, yang mendefinisikan kekerasan sebagai :

*“any avoidable impediment to self-realization”.*⁷

“apa saja pencegahan halangan untuk merealisasikan diri”

Jadi, kekerasan adalah segala sesuatu yang menyebabkan orang terhalang untuk mengaktualisasikan potensi diri secara wajar. Namun, Galtung menambahkan bahwa penghalang itu adalah sesuatu yang bisa dihindari. Artinya, kekerasan bisa dihindarkan kalau penghalang itu disingkirkan.

Dari konseptualisasi Galtung itu, kekerasan dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu: kekerasan langsung atau personal adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor kepada pihak lain. Dan kekerasan tidak langsung adalah kekerasan yang dilakukan oleh satu atau sekelompok aktor tidak langsung kepada pihak lain. Kekerasan tidak langsung dilakukan dengan menggunakan alat dan ia merupakan sesuatu yang terwujud dalam struktur.

⁷Johan Galtung, *The True Worlds: A Transnational Perspective*, (New York: The Free Press, 1980), hal. 67, dikutip dari buku Mohtar Mas' oed, *Kekerasan Kolektif Kondisi dan Pemicu*, (Yogyakarta: P3PK UGM, 2000), hlm. 21.

Dari sisi lain, untuk menjelaskan berbagai tindak kekerasan yang terjadi di Indonesia, khususnya di Maluku yang sudah dalam bentuk kerusuhan itu, dapat dilihat dari faktor psikologis. Salah satu ekplanasi yang menarik diberikan oleh para pendukung pendekatan psikologis, yang berasumsi bahwa semua fenomena politik termasuk tindak kekerasan politik, bermula dari pikiran manusia. Berdasar asumsi tersebut, upaya mereka menemukan penyebab dasar kerusuhan dipusatkan pada faktor psikologis, yaitu perasaan dan kesadaran orang mengenai kekecewaan. Secara ringkas, argumennya adalah bahwa kekerasan politik pada aras komunitas itu terjadi karena adanya perasaan frustrasi yang mendalam dan meluas di kalangan masyarakat, akibat dari deprivasi dan perlakuan yang tidak adil. Dengan kata lain, kekecewaan masyarakat terhadap deprivasi dan perlakuan yang tidak adil merupakan motif utama tindak kekerasasn politik seperti kerusuhan. Tapi untuk menjelaskan kekerasan-kekerasan yang terjadi selama konflik Ambon-Maluku nanti penulis tidak menggunakan pendekatan psikologis, akan tetapi lebih cenderung menggunakan pendekatan sosiologis.

Berbicara tentang masalah kekerasan, mau tidak mau kita menjadi ingat dengan sebutan yang diberikan oleh pemikir besar yang hidup pada abad XVII yaitu Thomas Hobbes. Hobbes mengemukakan tentang "*Homo Homini Lupus*" (manusia yang satu adalah serigala bagi manusia lain). Teori tersebut berpokok pangkal pada keadaan manusia sebelum adanya negara. Jadi masih dalam keadaan manusia sebelum adanya negara, jadi masih dalam keadaan alamiah di mana manusia hidup dalam keadaan alam bebas tanpa ikatan suatu apa pun. Dalam keadaan tersebut, manusia selalu saling bermusuhan, saling menganggap lawan, dan saling merasa

takut. Sehingga selalu terjadi perlawanan/peperangan seorang melawan semua orang. Keadaan semacam itulah yang disebut sebagai "*Bellum Omnium Contra Omnes*" dimana setiap orang selalu memperlihatkan keinginan-keinginannya yang bersifat egois.⁸

Dari penjelasan tentang fenomena agama dan beberapa teori kekerasan yang dijelaskan di atas kita dapat mengamati dan merekonstruksi kerusuhan yang terjadi di Ambon-Maluku beberapa waktu yang lalu.

Kerusuhan di Ambon-Maluku meletus pertama kali pada 19 Januari 1999, bertepatan dengan umat Islam merayakan hari raya Idul Fitri. Sejak itu, pertikaian terus berlangsung, dan tidak hanya terpusat di Ambon tapi meluas hingga ke daerah lain di sekitar pulau Ambon seperti pulau Kei, Banda, Seram, Haruku, Saparua, Sanana dan pulau-pulau lain yang kini termasuk Maluku Utara seperti Ternate, Halmahera dan Obi.⁹ Akibatnya sebagian penduduk beragama Islam maupun Kristen mengungsi ke daerah lain diluar Ambon, termasuk ke Maluku Utara (Ternate dan Halmahera).

Konflik komunal di Ambon telah memakan korban sekitar 1.134 warga sipil dan 18 aparat tewas; gedung pemerintah 35; sekolah 20; bank 4; tokoh 719; masjid 45; gereja 47; kendaraan roda dua 128; kendaraan roda empat 198;¹⁰ dan lebih dari 70.000 orang terpaksa mengungsi. Di samping itu, kerusuhan Ambon juga telah mengakibatkan perekonomian dan kegiatan pendidikan terganggu, terjadi

⁸Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, t.t.), hlm. 99.

⁹Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesty Internasional, *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*, (Yogyakarta: Wihdah Press, 2000), hlm. 402.

¹⁰*Tempo*, edisi 17-23 Januari 2000, hlm. 15

disintegrasikan wilayah dan sosial (wilayah Ambon kini “terbelah” masing-masing menjadi wilayah Islam, wilayah Kristen, dan wilayah netral), serta hilangnya rasa aman warga masyarakat.¹¹ Masyarakat yang beragama Kristen dan Islam yang tadinya berhubungan baik, kini telah berubah, hubungan mulai menjadi renggang serta saling curiga satu sama lain.

Akhirnya keutuhan hubungan antar agama di Ambon-Maluku menjadi hancur, agama begitu mudah digunakan sebagai alat dan sarana adu domba, demi kepentingan-kepentingan tertentu.

Kerusuhan yang terjadi di Ambon-Maluku bukanlah konflik biasa. Dalam kenyataannya, ini bukan konflik, yang terjadi adalah rakyat dipaksa untuk berkonflik.¹² Untuk dapat memahami dinamika konflik di Ambon-Maluku perlu kiranya dikaji terlebih dulu sumber-sumber penyebab konflik tadi. Secara umum dapat diidentifikasi beberapa sumber-sumber konflik tadi sebagai berikut :

1. Terjadinya proses migrasi yang berkelanjutan dari suku Bugis, Buton dan Makasar (BBM) yang berawal sekitar abad ke XVI dan mencapai eskalasinya sekitar tahun 1970-an telah membentuk *diaspora* yang tidak terlalu kondusif untuk berasimilasi.
2. Timbulnya ketidakseimbangan demografis dan ketidakseimbangan hubungan sosial ekonomi baru antara penduduk asli “merah” di satu pihak dan kaum migran dan penduduk asli “putih” di lain pihak yang merubah status quo dan

¹¹ Tim Peneliti LIPI, *Bara dalam Sekam Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik Lokal di Aceh, Maluku, Papua, & Riau*, (Bandung: Mizan, 2001), hal.77.

¹² Jan Nanere, dkk., *Halmahera Berdarah, Kerusuhan Maluku Seri Pertama*, (Ambon: Yayasan BIMASPELA, 2000), hal. 22.

mengurangi privilege yang selama periode kolonial lebih dinikmati kelompok “merah”;

3. Reaksi kebijakan pemerintah Soeharto yang telah mencoba mencari *political base* baru di kalangan kaum Muslim yang mensubstitusikan (atau setidaknya mengkomplementariskan) *political base* ABRI yang kemudian terefleksi di dalam kebijakan rekrutmen dan kebijakan *affirmative action* gubernur yang lalu yang cenderung memarginalkan kelompok “putih”.
4. Terjadinya erosi budaya lokal, khususnya mekanisme penyelesaian konflik tradisional yang dikenal dengan istilah *pela gandong*, sebagai akibat dari UU no. 5 tahun 1974 dan UU no. 5 tahun 1979 yang telah merubah struktur kekuasaan tradisional dari sistem berdasarkan kelompok menjadi sistem berdasarkan wilayah. Kekuasaan *latupati* atau *raja* digantikan oleh kekuasaan kepala desa yang tidak memiliki kewenangan kharisma yang secara tradisional dimiliki oleh *latupati*.
5. Tidak atau belum terbentuknya mekanisme penyelesaian konflik antara *diaspora* penduduk pendatang dan penduduk asli karena penduduk pendatang tidak termasuk dalam domain *pela gandong*;
6. Adanya tangan-tangan jahat yang mempunyai skenario makro untuk mengeksploitasi kawasan-kawasan yang secara embryonal mempunyai potensi konflik.¹³

¹³Moeljarto Tjokrowinoto, *Dinamika Konflik dan Rekonsiliasi di Ambon*, (Dalam: Seminar Bulanan di P3PK-UGM, 1999), hlm. 7

Secara historis sebenarnya masyarakat Maluku, khususnya masyarakat Ambon, dapat menerima dan menghargai pluralitas agama, bahasa maupun etnis. Bagi masyarakat Maluku, baik masjid maupun gereja adalah milik mereka bersama. Mereka bergotong royong dalam membangun dan memeliharanya. Mungkin hal ini berakar pada nilai tradisional *gandong*, yang arti harfiahnya adalah rahim (*womb*) yang melahirkan mereka bersama, meskipun berbeda agama.¹⁴ Loyalitas dan solidaritas antara anggota masyarakat amat mendalam. Mereka etnis yang pemaaf dan bukan pendendam. Meskipun konflik-konflik antara kelompok sosial sering terjadi akan tetapi konflik tadi selalu dapat diselesaikan melalui konsensus kultural yang merefleksikan dialektika yang harmonis (*harmonious dialectic*) sebagai pola manajemen kultural.

Namun kekerasan yang berbentuk kerusuhan di Ambon-Maluku itu sudah menjadi suatu kenyataan. Dan peristiwa tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa masalah kerusuhan Maluku merupakan implikasi dari berbagai kepentingan seseorang atau sekelompok orang demi sebuah kekuasaan. Seperti yang dikemukakan oleh filsuf Bertrand Russell, bahwa dorongan/motivasi seseorang berbuat sesuatu adalah dorongan untuk mendapat/memegang kekuasaan. Adanya hasrat/keinginan untuk berkuasa itulah yang menyebabkan seseorang berusaha mewujudkannya, meskipun dengan jalan apa pun (termasuk dengan kekerasan).¹⁵

¹⁴FKKM-Yogyakarta, *Studi Kritis atas Kerusuhan Ambon*, (Yogyakarta: 1999, pp), hlm. xiv-xxv.

¹⁵Krisni Noor Patrianti, "Kekerasan: Suatu Tinjauan Filosofis", (Dalam: *Jurnal Teologi Gema* edisi 7 Fakultas Theologia UKDW, 1995), hlm. 123.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa kasus kerusuhan yang terjadi di Indonesia – khususnya di Maluku – beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa perang – yang terjadi antara dua kelompok yang bertikai – barangkali merupakan puncak dari kekerasan yang selama ini terjadi. Meskipun demikian, perang tetap hanya salah satu bentuk kekerasan. Artinya masih banyak bentuk-bentuk kekerasan lain yang tentu saja selalu merugikan dan menghancurkan hidup manusia, seperti perampokan, penganiayaan, pemerkosaan, pengusuran, dan larangan berbicara/berpikir/ bertindak.

Berdasar latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis ketengahkan adalah sebagai berikut : *Pertama*, apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya konflik antar kelompok yang meluas menjadi kerusuhan massa berbasis pada agama di Ambon-Maluku, dan *Kedua*, bagaimana bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dan akibat-akibat yang ditimbulkannya.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui beberapa faktor yang menjadi penyebab kerusuhan di Ambon-Maluku tersebut.
2. Untuk melihat bentuk-bentuk kekerasan yang muncul selama terjadinya konflik di Ambon-Maluku.
3. Untuk memenuhi persyaratan akademik sebagai sarjana Strata 1 pada Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Metode Penelitian

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemology penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian.¹⁶

Beberapa aspek metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi nanti sebagai berikut:

1. Sudut pandang yang penulis lakukan dalam menguraikan dan menjelaskan masalah konflik Ambon-Maluku adalah dengan pendekatan Sosio-Historis, metode ini digunakan dengan maksud membuat rekonstruksi masa lampau secara obyektif dan sistematis, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesis bukti-bukti untuk mendukung fakta dalam memperoleh kesimpulan yang kuat.¹⁷
2. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Bahan-bahan kepustakaan merupakan sumber data-data primer yang menjadi acuan utama dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisis isi yaitu suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

¹⁶Husaini Usman, & Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1996), hlm. 4.

¹⁷*Ibid.*

inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁸

3. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.¹⁹

E. Tinjauan Pustaka

Banyak tokoh dan pakar dalam bidang tertentu khususnya mengenai dehumanisasi yang berbicara tentang agama dan kekerasan. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah :

1. Erich Fromm, dalam buku *The Anatomy of Human Destructiveness* (diterjemahkan oleh Pustaka Pelajar menjadi *Akar Kekerasan*), berusaha menganalisis kejahatan dan tindak destruktif manusia. Fromm membuktikan bahwa kekerasan yang berwujud kejahatan dan tindakan destruktif bukanlah sesuatu yang instingtif, bukan bawaan.
2. M. Dawam Rahardjo, dkk dalam bukunya "*Agama dan Kekerasan*" mencoba menyoroti beberapa persoalan serius mengenai dehumanisasi dengan suatu kajian agenda riset perdamaian, dengan mencoba mengaitkan peranan yang

¹⁸Klaus Krippendorf, *Analisis Isi: Pengantar teori dan Metodologi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1991), hlm. 15.

¹⁹Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

dapat disumbangkan oleh agama yang menghadapi persoalan kemanusiaan yang sudah sangat kompleks tersebut.

- 3 Ign. Bambang Sugiharto, dkk. dalam buku *Atas Nama Agama, Wacana Agama dalam Dialog "Bebas" Konflik*, memperlihatkan berbagai persoalan yang sangat dilematis bagi agama. Di satu sisi, ia diharapkan tampil sebagai pembawa kearifan atau pemecahan persoalan. Di sisi lain, ia justru terus menerus tampil sebagai salah satu penyebab terbesar munculnya berbagai persoalan. Di dalam buku tersebut juga diuraikan beberapa hal yang menjadi tantangan yang masih di hadapi oleh setiap agama, diantaranya, *pertama*, dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditandai disorientasi nilai dan degradasi moralitas ini, agama di tantang untuk lebih tampil sebagai suara moral yang otentik; *kedua*, siap tidak siap, agama juga harus menghadapi kecenderungan pluralisme, mengolahnya dalam kerangka teologi dan mewujudkannya dalam aksi-aksi kerja sama plural. Dan tantangan yang *ketiga*, adalah bila agama ingin berperan penting dalam situasi kemelut posmodern ia mesti tampil, dengan cara apa pun, sebagai pelopor perlawanan terhadap segala bentuk penindasan dan ketidakadilan, termasuk "ketidakadilan kognitif", yang biasanya diciptakan antara lain justru oleh agama-agama itu sendiri.
- 4 Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional menulis tentang "*Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980 – 2000*". Buku ini mengisahkan bencana kemanusiaan yang ditimpakan atas kaum muslimin oleh penguasa Indonesia sepanjang kurun waktu 20 tahun terakhir ini. Termasuk juga

kerusuhan yang terjadi di Maluku yang – menurut prespektif buku ini – banyak merugikan kaum muslimin.

- 5 Jan Nanere dkk dari Yayasan BIMASPELA telah menerbitkan buku berjudul “*Halmahera Berdarah*”. Penjelasan konflik dalam buku ini berisi fakta-fakta yang lebih cenderung memihak kepada salah satu kelompok masyarakat yang ada di Maluku yaitu komunitas Kristen.
- 6 Tim peneliti LIPI telah menulis suatu buku yang berjudul “*Bara dalam Sekam Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau*”. Buku ini memfokuskan pada pencarian akar masalah yang fundamental dan tawaran solusi atas gejala serta ledakan kekerasan di sejumlah daerah rawan konflik di Tanah Air. Asumsi yang ada dalam buku ini adalah bahwa pergolakan politik seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau dipandang sebagai produk dan dampak dari kekeliruan fatal negara yang menempatkan daerah sebagai subordinasi kekuasaan sentralistik pemerintah pusat.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan, perlu dibuat suatu sistematika yang baik agar uraian dalam tulisan ini runtut dan bisa mencapai sasaran penulisan. Adapun sistematika pembahasan dari tulisan ini adalah.

Bab pertama merupakan bab yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi uraian tentang kondisi atau situasi umum Ambon-Maluku sebelum kerusuhan terjadi pada 19 Januari 1999. Mulai dari kondisi sebelum Kolonial datang, pada masa Kolonial sampai pada perkembangan hubungan agama di masa Orde Baru. Dalam bab ini juga akan diuraikan sedikit tentang fase-fase konflik yang terjadi selama kerusuhan Ambon.

Bab ketiga akan menguraikan beberapa faktor yang mendasari terjadinya konflik di Ambon-Maluku. Namun sebelumnya akan diuraikan terlebih dahulu beberapa perbedaan persepsi yang berkembang di masyarakat terhadap penyebab kerusuhan yang terjadi itu.

Bab keempat, akan menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama kerusuhan Ambon-Maluku, baik kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung serta dampak yang ditimbulkan dari konflik itu.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran serta kata penutup, dilengkapi dengan daftar pustaka, abstraksi, *curriculum vitae* dan lampiran-lampiran

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kerusuhan Ambon-Maluku 19 Januari 1999 sampai sekarang antara lain:
 - *Faktor sejarah.* Terutama pada masa Kolonial yang telah membentuk segregasi sosial berbasis pada agama yaitu kelompok Islam dan kelompok Kristen.
 - *Faktor perubahan komposisi penduduk dan kesenjangan sosial-ekonomi.* Di mana terjadi dikotomi antara Islam dan Kristen dalam hal gaya hidup, tingkat pendidikan, dan profesi/pekerjaan di kedua kelompok masyarakat tersebut. Hal ini dipertajam oleh datangnya kaum migran yang kebanyakan adalah beragama Islam.
 - *Faktor politisasi Birokrasi lokal (“Islamisasi” dan “Kristenisasi” Birokrasi).* Terutama dua gubernur Maluku terakhir yang dijabat oleh orang-orang Ambon beragama Islam. Kedua pejabat itu diduga melakukan “penggusuran” birokrat-birokrat Ambon yang beragama Kristen dari kantor gubernuran Maluku.
 - *Faktor hancurnya mekanisme tradisional (Pela Gandong).* Yang mana dalam 20 tahun terakhir ini, sistem tradisional tersebut mengalami degradasi fungsional. Hal ini terjadi terutama di kalangan muda.

- *Faktor reformasi*. Di mana -patut diduga- telah terjadi konflik kepentingan elit pusat dan oknum-oknum militer, antara yang menginginkan reformasi berjalan dengan kelompok yang tidak menghendaki terjadinya reformasi.
 - Di sisi lain, agama menjadi simbol pengikat antara dua kelompok yang bertikai di Ambon-Maluku. Di samping itu juga agama menjadi kekuatan yang mampu mengintensifkan dan memperluas konflik yang terjadi.
2. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi selama kerusuhan Ambon-Maluku antara lain: a) *Kekerasan langsung*, berupa terjadinya pembunuhan, penganiayaan dan pembakaran terhadap kelompok-kelompok minoritas yang terdapat di suatu wilayah tertentu di Ambon-Maluku yang mengakibatkan banyaknya orang meninggal dan yang luka-luka. Hal ini juga telah menyebabkan penduduk harus mengungsi ke daerah lain yang lebih aman; b) *Kekerasan tidak langsung*, berupa kerusakan fisik yang mengakibatkan kegiatan sosial, ekonomi, politik dan pemerintahan lumpuh. Di samping itu juga terjadi dampak yang sangat fatal akibat dari konflik Maluku tersebut, yaitu terjadinya segregasi sosial berdasar identitas agama. Segregasi sosial itu terjadi sebagai akibat akumulasi dari konflik yang berlangsung selama ini.

B. Saran-saran

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai akar permasalahan yang menjadi faktor utama dari kerusuhan yang terjadi di Ambon-Maluku. Karena masih terjadi perbedaan persepsi tentang faktor-faktor penyebab dari kerusuhan tersebut.
2. Dalam melihat konflik, kita dituntut untuk lebih berpikir dan bersikap obyektif terhadap permasalahan yang muncul.. Hal ini penting dalam melihat dan mengamati penyebab utama dari konflik yang terjadi, sehingga bisa membantu dalam proses-proses perdamaian yang akan diupayakan nantinya.

C. Kata Penutup

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberi banyak kenikmatan kepada hamba-Nya. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendirinya dan untuk orang lain pada umumnya. Kritik serta saran selalu penulis harapkan untuk pengembangan skripsi ini.

Akhirnya hanya doa yang tulus, semoga bangsa dan negara kita ini selalu diberi kedamaian dan kesejahteraan oleh Allah SWT, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya serta semoga semua kegiatan yang kita lakukan merupakan ibadah kepada-Nya yang mengantarkan kepada ridha-Nya. *Amin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Carolina Alfons. *Pembinaan Pemuda Putus Sekolah dan pengaruhnya Terhadap Terciptanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe Kotamadya Ambon*, Ambon: Skripsi tidak diterbitkan, Fisip Universitas Pattimura, 1994.
- Al-Chaidar dan Tim Peduli Tapol Amnesti Internasional. *Bencana Kaum Muslimin di Indonesia 1980-2000*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.
- Audi, Robert. *The Justification of Violence*, dalam: *Philosophy for a New Generation*, 1987.
- Budyanto. "Dasar Teologis Kekerasan dalam Masyarakat yang Beraneka-ragam", dalam: *Jurnal Teologi Gema*, edisi 50, Fak. Theologia UKDW, 2000.
- Barlow, Colin dan Johan Harjono. ed., *Indonesia Assessment 1995, Development in Eastern Indonesia*, Canberra: RSPAS, ANU, 1996.
- Chauvel, Richard. *Nationalists, Soldier and Separatists*, Leiden: KITLV Press, 1990.
- Cooley, Frank. *Altar and Throne in the Central Moluccan Societies*, Yale University, 1996.
- Camara, Dom Helder. *Spiral Kekerasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- , "Ditahan, 53 Tersangka Kerusuhan Ambon", dalam: *Kompas*, 7 Agustus 1999.
- Edi Mulyono. "Agama Perdamaian atau Narsistis", dalam: *Basis*, No. 03-04, tahun ke-49, Maret – April 2000.
- Fromm, Erich. *Akar Kekerasan*, terj. Imam Muttaqin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- , *Gatra*, No. 10, tahun VI, 22 Januari 2000.
- Hazleton, William A. *Ending violent Ethnic Conflict: Separation or Sharing as Option for Negotiation*, *Nationalism & Rthnic Politics*, Vol. 4, No. 3, 1998.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

- , *Hak Asasi Manusia dan Resolusi Konflik Ambon dan Sambas*, Yogyakarta: IDEA, 1999.
- I Marsana Windu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, t.k. Refleksi Sosial, 1991.
- Jan Nanere, dkk., *Halmahera Berdarah, Kerusuhan Maluku Seri Pertama*, Ambon: Yayasan BIMASPELA, 2000.
- , "Kepercayaan Masyarakat Ambon Kepada Pemerintah Berkurang", dalam: *Kompas*, 15 Agustus 1999.
- , "Kerusuhan Ambon Makin Parah", dalam: *Kompas*, 20 Oktober 1999.
- Keuning, J. *Sejarah Ambon Sampai pada Akhir Abad ke-17*, terj. S. Gunawan, Jakarta: Bhatara, 1973.
- Krisni Noor Patrianti. "Kekerasan: Suatu Tinjauan Filosofis", dalam: *Jurnal Teologi Gema*, edisi 50 Fak. Theologia UKDW, 1995.
- Krippendorf, Klaus. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Jakarta: Rajawali Press, 1991.
- , *Luka Maluku Militer Terlibat*, Jakarta: ISAI, 2000.
- Limas Sutanto, "Menangkal Tangan-tangan Jahat", dalam: *Kompas*, 7 Agustus 2000.
- Lea Imelda Rehatta. *Pengendalian Sosial Melalui Sosialisasi dalam Keluarga Sebagai Upaya Pencegahan Tingkah Laku Menyimpang Para Remaja di Kelurahan Kudamati Kotamadya Ambon*, Ambon: Skripsi tidak diterbitkan, Fisip, Universitas Pattimura, 1997.
- Lambang Trijono, "Justifikasi dan Legitimasi Kekerasan: Melacak Akar Kekerasan dalam Struktur Budaya Masyarakat", dalam: *Wacana*, No. 2 (1), 1999.
- , *The May 1998 solo riot, political-economies crises and anti-chinese violence in Indonesia*, Thesis unpublished, The Department of Social Policy and Sociology, The University of Sydney, 1999.
- , *Keluar dari Kemelut Maluku, Refleksi Pengalaman Praktis Bekerja Untuk Perdamaian Maluku*, dalam: Laporan hasil penelitian tentang konflik Ambon-Maluku, 2000.

- Mohtar Mas'oe'd, dkk., ed., *Kekerasan Kolektif kondisi dan Pemicu*, Yogyakarta: P3PK UGM, 2000.
- Munir. *Kerusuhan Ambon dan Pola Penyelesaiannya Sebagai Sebuah Proyek Militer*, Paper untuk diskusi terbatas "Identifikasi Akar Permasalahan di Ambon dan Solusinya", di PPW-LIPI, Jakarta: 26 Januari 2000.
- Moh. Nazir. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moeljarto Tjokrowinoto, *Dinamika Konflik dan Rekonsiliasi di Ambon*, Makalah pada Seminar Bulanan P3PK UGM, 1999.
- Nottingham, Elizabeth K. *Agama dan Masyarakat Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, terj. Abdul Muis Naharong, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- O'dea, Thomas F. *Sosiologi Agama Suatu Pengenalan Awal*, terj. Tim Penerjemah YASOGAMA, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- , "Orang Maluku Kecewa Pemerintah RI Terima Delegasi RMS", dalam: *Republika*, 17 Januari 2000.
- , "Pembangunan Kembali Masjid dan Gereja di Ambon", dalam: *Kompas*, 7 Februari 2000.
- Pariela, Tony D. *Social Transformation in Soya Atas Village*, in David Mearns, ed., *Remaking Maluku*, Australia: The Univesity of Northern Territory, 1997.
- , "Pengungsi Kerusuhan Maluku 66.487 Jiwa", dalam: *Kompas*, 9 Agustus 2000.
- Rustam Kastor. *Fakta, Data dan Analisa Konspirasi Politik RMS dan Kristen Menghancurkan Ummat Islam di Ambon-Maluku*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2000.
- Rom Tomatipasang. "Pemetean sebagai alat pengorganisasian masyarakat; sejarah dan politik sengketa sumberdaya alam hak-hak kawasan masyarakat adat Maluku", dalam Ton Dietz, *Pengakuan Hak Atas Sumberdaya Alam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Schwardz, Adam and Jonathan Paris, ed., *The politics of post-Suharto Indonesia*, NewYork: Council on Foreign Relation, 1999.
- S. Sinansari Ecip. *Menyulut Ambon, Kronologi Merambatnya Berbagai Kerusuhan Lintas Wilayah di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1999.

- , *Suara Pembaharuan*, 24 Januari 2000.
- , *Suara Pembaharuan*, 2 Februari 2000.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberti, t.t.
- Sumarsono, dkk., *Sistem Pemerintahan Tradisional Ambon*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 1993.
- , "Tentara Asing Terlibat Pembantaian", dalam: *Republika*, 7 Januari 2000.
- Tamrin Amal Tomagola. *Oh Tuwang Alah: Ambon Tabakar*, Paper dalam Workshop "Identifikasi Daerah-daerah Rawan di Indonesia", di PPW-LIPI, Jakarta, 21 Desember 1999.
- , *Dia (Wiranto) Tahu Jawabnya*, dalam: DR, No. 23/XXXI/17-23 Januari 2000.
- Tri Ratnawati. *Identifikasi Akar Permasalahan di Daerah Ambon dan Solusinya*, Paper dalam diskusi terbatas tentang Ambon di PPW-LIPI Jakarta, 21 Desember 1999.
- Tim Peneliti LIPI. *Bara dalam Sekam, Identifikasi Akar Masalah dan Solusi atas Konflik-konflik di Aceh, Maluku, Papua, & Riau*, Bandung: Mizan, 2001.
- , *Tempo*, edisi 1-8 Februari 1999.
- , *Tempo*, edisi 17-23 Januari 2000.
- , *Tajuk*, edisi 4-17 Maret 1999.
- , *The Jakarta Post*, 5 Agustus 1999.
- , *The Jakarta Post*, 11 Agustus 1999.
- , *The Jakarta Post*, 20 Agustus 1999.
- Vayrymen, Tarja. *Ethnic Communalism and Conflict Resolution, Cooperation and Conflict*, Vol. 33 (1), 1998.
- Ziwar Effendi. *Hukum Adat Ambon Lease*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.

LAMPIRAN

Kronologi kerusuhan ambon-maluku

Waktu	Peristiwa/kejadian
19 Januari 1999	Ambon rusuh. Setidaknya 11 orang tewas (termasuk 1 polisi) dan 23 orang terluka saat itu. Rumah, toko, mobil, motor, dan becak banyak yang hangus. Pemicu konflik adalah perkelahian Yopie Saiya dengan Mohammad Bugis. Desa Batumerah dengan tetangganya, Mardika, berperang atas nama panji agama.
21 Januari 1999	Ambon menjadi kota mati yang tercabik-cabik. Listrik mati di sejumlah tempat karena perangkat PLN hangus atau rusak disana-sini. Gerombolan massa tampak dibanyak tempat. Terkadang mereka melakukan razia. Gubernur Maluku, M. Saleh Latuconsina memberlakukan jam malam di Pulau Ambon dan Maluku. Kapolri Letjen Roesmanhadi menyebut 22 orang tewas dan 102 luka berat.
22 Januari 1999	Panglima TNI Jenderal Wiranto tiba di Ambon. Dia memerintahkan Pangdam VIII/Trikora Mayjen Amir Sembiring menangkap dan mengadili provokator kerusuhan Ambon.
23 Januari 1999	Pangdam VIII/Trikora mengeluarkan perintah tembak di tempat terhadap warga yang melawan petugas ketika hendak dilucuti senjatanya.
23 Januari 1999	Panglima TNI Jenderal Wiranto membantah tuduhan bahwa ABRI berat sebelah dalam menangani kasus Ambon.
24 Januari 1999	Suasana mulai pulih. Kegiatan masyarakat berangsur normal, termasuk di pasar. Pangdam Trikora didampingi

	Kapolda Maluku Kol. Karyono SM, mengatakan telah menahan 50 orang yang diduga pemicu gejolak.
25 Januari 1999	Bandara Pattimura dibuka lagi untuk penerbangan regular. Ini menjadi indikasi bahwa keadaan cukup terkendali.
26 Januari 1999	Kapolda Kol. Karyono menyebut 55 orang tewas sesuai dengan jumlah jenazah yang ditemukan. Situasi di ambon kian membaik. Jalanan semakin ramai.
27 Januari 1999	Penyidik dari Mabes Polri mendatangi Gus Dur untuk meminta konfirmasi tentang sinyalemen keterlibatan seorang anggota TNI, DINA "K", sebagai salah satu provokator dalam kasus Ambon.
28 Januari 1999	Sekitar 2.500 warga asal Sulawesi Selatan tiba di ujung pandang dengan menumpang kapal KM. Siguntang. Inilah awal gelombang eksodus dari Ambon dalam jumlah besar. Selanjutnya pengungsian berlanjut terus. Sebagai catatan penting, kaum pribumi Ambon termasuk mereka yang ikut eksodus. Inilah yang memunculkan adanya skenario genocide (pemusnahan), atau setidaknya penghalauan kelompok agama tertentu dari Maluku.
1 Februari 1999	Kadispen Mabes Polri Brigjen Togar Sianipar mengungkapkan indikasi keterlibatan warga Maluku yang baru tiba dari Jakarta dalam kerusuhan Ambon. Sebelumnya (November 1998) terjadi peristiwa Ketapang (di Jakarta) yang dikabarkan menimbulkan korban di kalangan preman Ambon. Setelah lading pencaharian mereka hilang, banyak di antara preman-preman tersebut pulang mudik ke Ambon.
2 Februari 1999	Tim Komnas HAM yang tiba sehari sebelumnya di Ambon sempat dicegat massa. Mobil mereka sempat digebrak-gebrak warga. Pasalnya, Komnas HAM dianggap kurang

	sigap dan lebih mengurus masalah dalam negeri yang menjadi keprihatinan barat.
3 Februari 1999	Pada saat Ambon membaik, kerusuhan meluas ke kecamatan Kairatu (pulau Seram). Awalnya adalah perkelahian dua pemuda yang berlanjut dengan pembakaran rumah-rumah. Warga panik dan kemudian berlari liar.
4 Februari 1999	Korps. Reserse Mabes Polri memanggil Yorris Raweyai. Menurut komandan Korps Reserse Mayjen Da'l Bachtiar, tokoh pemuda pancasila tersebut dimintai keterangan sehubungan dugaan keterlibatannya dalam kerusuhan Ambon.
18 Februari 1999	Setelah tenang selama dua minggu, Ambon kembali digoyang. Lima bom meledak di desa Batumerah dan Karang Panjang, dini hari. Tembakan dari aparat keamanan tampaknya mampu menenangkan massa. Perbaikan rumah dan tempat ibadah dimulai.
22 Februari 1999	Ketua umum PB NU Gus Dur bertemu dengan Presiden B.J. Habibie, termasuk untuk berbicara soal Ambon. Menurut Gus Dur, Wiranto menjanjikan pemulihan keamanan di ambon dalam sebulan lagi.
23 Februari 1999	Batumerah, Ambon, kembali diguncang bom. Ledakan pertama terdengar pada pukul 11.30. massa dari kelompok Islam dan Kristen segera siaga perang. Tembakan dari aparat menyebabkan puluhan orang terluka kena peluru nyasar. Kota ambon menjadi lumpuh.
28 Februari 1999	Insiden berdarah terjadi lagi tak lama setelah kesepakatan damai ditandatangani para kepala desa, camat, pemuka agama, adat, pemuda dari pulau-pulau Ambon, Haruku, Saparua, dan Nusa Laut. Lima orang sekeluarga dibantawi

	<p>di dusun Ahuru, Batumerah, subuh, sekelompok warga warga Ahuru menyerang dusun Rinjani. Tiga orang tewas akibat tembakan polisi. Perlu dicek kebenarannya, korban diberondong polisi saat shalat di masjid.</p>
2 Maret 1999	<p>Kadispen Mabes Polri Brigjen Togar Sianipar membantah laporan media massa bahwa seakan polisi menembak warga yang sedang shalat di Masjid Muhajirin pada 1 Maret.</p>
3 Maret 1999	<p>Panglima TNI Jenderal Wiranto, dengan alasan penilaian operasional, memerintahkan Kapolri Roesmanhadi untuk mengganti Kapolda Maluku Kol. Karyono SM</p>
5 Maret 1999	<p>Unjuk rasa mengecam pemerintah yang terlalu lamban menangani kasus Ambon. Suasana Ambon waktu itu masih mencekam, terjadi pembakaran rumah di batu gantung dan benteng atas. Seorang warga dianiaya di pasar mardika hingga tewas. Ledakan keras terdengar disekitar gereja Silo. Dibeberapa tempat gerombolan massa melakukan razia</p>
6 Maret 1999	<p>Satu tewas dan 17 luka-luka tatkala aparat keamanan memberondong massa yang berkumpul di depan gereja Silo di jalan sangaji, ambon</p>
8 Maret 1999	<p>Mayjen Kivlan Zen, Koordinator Staf ahli KSAD, menemui Gus Dur untuk klarifikasi soal "Mayjen K" yang turut menjadi provokator pada kasus Ambon. Gus Dur tidak bersedia menjelaskan siapa "Mayjen K". tim khusus ABRI yang terdiri atas 19 perwira asal Ambon mulai bekerja. Tim yang dipimpin Mayjen Suaidi Marasabessy ini bertugas menghentikan pertikaian dan menegakkan hukum. Kerusuhan terus berlanjut, sedikitnya tiga tewas dan puluhan luka-luka. Belasan rumah hangus terbakar akibat bom rakitan. Di Airlalobar Bawah bom menggelegar</p>

	puluhan kali.
9 Maret 1999	Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan A.M. Hendropriyono dalam sebuah diskusi di Ambon mensinyalir keterlibatan RMS di balik kerusuhan Ambon. "Tim 19" ABRI bertemu dengan Tim Rekonsiliasi yang beranggotakan tokoh-tokoh agama (Islam, Kristen dan Katolik) serta kum intelektual Ambon. Situasi di Kodya Ambon tetap mencekam. Pada malam hari terdengar bom dahsyat di Jalan Diponegoro, aparat keamanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa bersenjata.
10 Maret 1999	Sedikitnya 10 orang tewas dan 30 lainnya luka berat di Ambon. Umumnya mereka ditembus peluru aparat
13 Maret 1999	Konflik Ambon mereda. Ini terjadi sejak komando pengendalian dialihkan dari Kapolda Maluku de Danrem 174/Pattimura, pada 11 Maret 1999. lalu lintas umu sudah kelihatan mulai ramai kembali, pertokoan dan sekolah-sekolah buka.
16 Maret 1999	Ketua Tim 19, Suadi Marasabessy mensinyalir provokator berpindah ke pinggiran Ambon dan mengubah metode gerakannya. Mereka membangun media hutan dalam meneror rakyat dan mengarahkan kegiatannya pada wilayah-wilayah yang penduduknya berbeda agama seperti pulau Haruku.
17 Maret 1999	Komandan Pusat Polisi Militer ABRI Mayjen Djasri Marin mengunjungi Gus Dur untuk menanyakan soal "Mayjen K". Gus Dur menyatakan bahwa yang ia maksud bukanlah Kivlan Zen.
6 April 1999	Konflik Ambon meluas ke Tual dan Kei Besar di Maluku Tenggara, sekitar 700 kilometer dari kota Ambon. Minimal 28 korban tewas di Maluku Tenggara.

23 April 1999	Manurut Kopolda Bugis Saman, 130 orang tewas selama kerusuhan di Tual. Kerusuhan juga merembet ke pulau Lontor (Banda), dan enam orang kehilangan nyawa
3 Mei 1999	Ikrar perdamaian secara adat berlangsung dengan melibatkan warga batumerah dan paso. Dalam acara yang dihadiri Gubernur M. Saleh Latuconsina, Danrem Karel Ralahulu, dan wali kota Ambon Christ Tanasela tersebut, ditegaskan kembali hakikat <i>pela gandong</i> , yakni saling mengasihi dan tidak saling bermusuhan.
6 Mei 1999	Yaob Lauhery alias Yopie (37 tahun) yang dituduh memicu kerusuhan Ambon 19 Januari 1999, dijatuhi vonis 6 bulan oleh pengadilan Negeri Ambon. Vonis Yopie lebih ringan dibanding tuntutan jaksa (10 bulan)
10 Mei 1999	Lima tewas dan 11 luka-luka saat sebuah minibus menghindari pencegatan warga. Pencegatan ini merupakan aksi balas dendam warga desa Wasi terhadap warg desa Liang yang membunuh seorang kawan mereka.
15 Mei 1999	Upacara likuidasi Korem 174/Pattimura menjadi Kodam XVI/Pattimura dipimpin Inspektur Upacara - KSAD Subagyo. 15 Mei adalah hari Pattimura. Bersamaan dengan acara ini (tiga hari setelah ikrar perdamaian), terjadi bentrokan antara massa dengan petugas. Sedikitnya tujuh mati dan 15 luka-luka, delapan rumah dan lima buah mobil diamuk massa.
21 Mei 1999	Datasemen Polisi Militer (Denpom) Kodam XVI memeriksa lima perwira AD sehubungan dengan penembakan oleh anak buah mereka yang mengakibatkan tewasnya tujuh warga sipil saat upacara obor Pattimura pada 15 Mei 1999.
31 Mei 1999	Setelah Kodam Pattimura terbentuk, komando

		pengendalian keamanan dan ketertiban Maluku dialihkan kembali dari militer (waktu itu Korem 174/Pattimura) ke Polda Maluku.
2 Juni 1999		Ambon kembali tegang akibat bentrokan antara massa kampanye PPP dengan khalayak. Aparat keamanan berulang-ulang menembak untuk mencairkan massa.
5 Juli 1999		Pangdam Brigjen Max M. Tamaela mengungkapkan adanya 16 anggota TNI dari kodam Pattimura sebagai tersangka dalam kasus obor Pattimura 15 Mei 1999
12 Desember 1999		Presiden Gus Dur dan Wapres Megawati berkunjung ke Ambon. Gus Dur menyatakan bahwa kerusuhan Ambon harus diselesaikan masyarakat Ambon sendiri.
24 Desember 1999		Ambon kembali tegang akibat "hilangnya" seorang warga dari kelompok agama tertentu yang terluka akibat kecelakaan mobil.
31 Desember 1999		Pada saat dunia merayakan millennium baru aparat keamanan berhasil mencegah bentrokan antar kelompok di batumerah Galunggung dan talake di Ambon, namun di Masohi (Maluku Tengah), 14 orang tewas dalam kerusuhan antara dua kelompok agama yang bertikai.
8 Januari 2000		Saat takbiran, dan perayaan "idul fitri" pagi harinya, suasana Ambon tenang. Hari berikutnya aksi atau demonstrasi menuntut pengakhiran konflik Ambon berlanjut, bahkan semakin besar. Gus Dur menyatakan kepada kelompok agama tertentu yang menyerukan jihad kepada umatnya, sebagai <i>manuver</i> untuk menjatuhkan dirinya
Januari 2000		Presiden Gus Dur meminta Ruud Lubbers Hoogewegen (mantan Perdana Menteri Belanda 1991-1994), untuk ikut membantu upaya rekonsiliasi dan pemulihan kondisi

	<p>masyarakat Maluku</p> <p>Menteri Luar Negeri Belanda, Jozias van Aartsen ketika berkunjung ke Jakarta pada 19 Januari 2000 menyatakan tidak adanya pasakon senjata dan orang ke Ambon dari orang-orang maluku di negeri Belanda.¹</p>
24 Januari 2000	<p>Wapres Megawati dan rombongan Menteri berkunjung ke Ambon. Megawati menyatakan kekhawatiran akan hilangnya satu generasi Ambon. Ini dikaitkan dengan begitu banyaknya kaum muda yang luka dan mati dalam kerusuhan di wilayah seribu pulau itu.²</p>

¹ *Kompas*, 20 Januari 2000

² Kronologi perkembangan kasus Ambon ini diambil dari buku "Bara Dalam Sekam, identifikasi akar masalah dan solusi atas konflik-konflik local di Aceh, Maluku, Papua, dan Riau", diterbitkan oleh penerbit Mizan bekerjasama dengan Tim Peneliti LIPI dan Kantor Menristek RI. Sebagian besar kronologi ini dikutip dari majalah DR, No. 23/XXXI/17-23 Januari 2000, serta beberapa sumber lainnya.

CURICULUM VITAE

1. Nama : Hairul Sani
2. Tempat/tanggal lahir : Sanggau Ledo, 29 September 1976
3. Alamat : Jl. Mohammad Sohor RT. III RW. XI No. 09
Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas
Kalimantan Barat 79153
4. Pendidikan : - Tamat SD Negeri 6 Pemangkat, tahun 1989
- Tamat MTs Negeri Pemangkat, tahun 1992
- Tamat MAN Filial Ushuluddin Singkawang,
tahun 1995
- Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 1995
5. Nama orang tua
Ayah : Rasani Usman (alm)
Ibu : Kamalah
6. Pekerjaan orang tua : PNS (pensiunan)

Demikianlah curriculum vitae ini kami buat dengan sesungguhnya